

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penggunaan konten YouTube sebagai jaminan pembiayaan telah diatur secara hukum oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022, disebutkan bahwa pemerintah akan membantu dalam menghitung nilai kekayaan intelektual. Namun, masih ada banyak kekurangan dalam penerapan aturan tersebut. Dibutuhkan sistem atau aturan standar yang jelas untuk menilai secara ekonomis tentang kekayaan intelektual. Namun pada dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis nilai ekonomi konten YouTube sebagai jaminan. Dengan menganalisis nilai ekonomi konten YouTube, diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan kredit bagi YouTuber dengan menjamin sertifikat hak kekayaan intelektual *channel* YouTube. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan jawaban untuk rumusan masalah yaitu:

1. Keabsahan konten Youtube sebagai jaminan pembiayaan diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022. Menurut regulasi ini, konten Youtube dan kekayaan intelektual lainnya bisa digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman dari bank atau lembaga keuangan nonbank. Perlu digaris bawahi yang dijadikan sebagai

jaminan pada konten youtube adalah sertifikat kekayaan intelektual dan beberapa persyaratan lainnya.

2. Perspektif hukum Islam tentang konten Youtube sebagai jaminan pembiayaan, Dalam hukum Islam, konten YouTube bisa digunakan sebagai jaminan pembiayaan. Jaminan pembiayaan ini adalah bagian dari Rahn atau jaminan hak cipta. Rahn dalam hukum Islam adalah ketentuan yang mengatur penggunaan harta bergerak sebagai jaminan atas suatu utang. Hal ini didasarkan pada Al-Quran dan Hadis Rasulullah SAW, khususnya surat Al-Baqarah ayat 283 dengan syarat sesuai dengan syariat Islam yang berlaku.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran pada penelitian ini adalah:

1. Pemanfaatan konten YouTube sebagai jaminan merupakan ide baru yang muncul karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang, hal ini terkait terdapat adanya hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki oleh para pembuat konten. Konten youtube termasuk kedalam Hak Cipta berbentuk sinematografi yang mereka *upload* melalui *platform* tersebut merupakan bentuk kreatifitas digital. Adapun, hal tersebut sudah ditegaskan melalui Undang-Undang Ekonomi Kreatif dan Peraturan Pemerintah Ekonomi Kreatif. Namun, inovasi tersebut masih mengalami banyak masalah, seperti penentuan nilai, obyek yang rentan terhadap pembajakan, dan pelaksanaan eksekusi jaminan sehingga menimbulkan penolakan dan keraguan dari lembaga keuangan sebagai kreditur. Oleh karena

itu, aturan yang mengatur dengan detail tentang penggunaan konten YouTube perlu ada guna untuk melindungi para pembuat konten dan lembaga keuangan yang terlibat. Peraturan tersebut harus mencakup hal teknis dan menjadi dasar hukum yang komprehensif. Permasalahan terhadap penentuan nilai dari konten youtube dapat diatasi. Karena pada penelitian ini penulis melakukan analisis nilai ekonomi konten YouTube sebagai jaminan. Dengan menganalisis nilai ekonomi konten YouTube, diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan kredit bagi YouTuber dengan menjamin sertifikat hak kekayaan intelektual channel YouTube.

2. Jika pengaturan lebih lanjut mengenai hal teknis itu tidak segera dilakukan, usaha Pemerintah untuk memastikan konten YouTube sebagai jaminan bisa gagal. Lembaga keuangan akan ragu memberikan pinjaman, serta hak ekonomi pembuat konten atau youtuber tidak bisa berkembang dan digunakan dengan maksimal.